

EKONOMI-POLITIK DAN REAKSI KULTURAL POPULISME KANAN-JAUH DI HUNGARIA DAN POLANDIA

Yoga Suharman¹, Iman Amirullah², Widia Olandari³, Devlyn Daevana Az
Zahrah⁴

¹²³⁴Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ekonomi dan Sosial,
Universitas Amikom Yogyakarta
¹yoga.shrmn@amikom.ac.id

Abstract

The phenomenon of the rise of far-right populism and the strengthening of identity politics in some Europe countries has received considerable academic and practical attention in the last decade. The rise of far-right populists in the electoral political process and the increasing public support in Hungary and Poland marked a new chapter of political contestation in the region. This article aims to examine how economic and cultural factors influence the rise of far-right populism in those countries. This study employs a qualitative approach with literary analysis and web-based research to obtain complex interplay between political-economy, cultural, and populist-far-right identity politics. This paper argues that the complex interplay between economic inequality and the superiority of traditional culture of “the self” are the triggers for the rise of far-right populist identity politics in Hungary and Poland.

Keywords: Hungary, identity, populism, ultra-nationalism, Poland

PENDAHULUAN

Perdebatan praksis dan akademis tentang populisme kanan-jauh (*far-right populism*) telah cukup lama absen dari Eropa selama periode pasca Perang Dunia II. Deklinasi itu dipengaruhi oleh kekhawatiran bahwa kekuatan populisme kanan-jauh di sebagian Eropa dapat mengarah pada xenofobia, kekerasan politik dan sekaligus mengingatkan kembali pada sejarah Nazisme dan Fasisme dalam coraknya yang paling ekstrem (Mudde, 2016). Namun, dalam kurun satu dekade terakhir, tren populisme kanan-jauh mengalami peningkatan cukup signifikan.

Peningkatan tersebut setidaknya dapat dilihat dari perolehan suara terhadap kelompok kanan-jauh dalam politik elektoral. Di Perancis pada Mei 2017, kandidat presiden sayap kanan Marine Le Pen berhasil memperoleh 34% dukungan suara. Pada September 2017, Alternatif for Germany dengan

platform anti-Euro dan anti-imigrasi berhasil meraih 12.6% suara dalam konteks Pemilu yang diwarnai dengan demonstrasi anti-imigran oleh gerakan politik sayap kanan, seperti Pegida (*Patriotic Europeans Against the Islamization of the Occident*). Kemudian, pada Oktober 2017, di Austria Partai Kebebasan Austria (FPÖ), yang didirikan oleh mantan perwira Schutzstaffe (SS), memperoleh 26% suara dan bergabung dengan koalisi yang berkuasa. Masih pada tahun 2017, Gerakan Volya sayap kanan memasuki parlemen Bulgaria untuk pertama kali dan, di Belanda, Partai Kebebasan anti-Islam pimpinan Geertz Wilders menjadi partai terbesar kedua di parlemen. Sweden Democrats, sejak 2010, memperoleh 17,6% dalam pemilu 2018 dan menjadi partai terbesar ketiga dalam parlemen negara tersebut (Sandrin, 2021). Pada Maret 2018, Five Stars Movement menjadi partai terbesar di Italia dan membentuk pemerintahan koalisi dengan Liga Sayap Kanan. Pada April 2018, Perdana Menteri Victor Orbán, pemimpin partai populis sayap kanan Hongaria, Fidesz, yang telah menjabat sejak 2010, memenangkan pemilihan untuk yang ketiga kali secara berturut-turut. Di Polandia, partai populis sayap kanan Law and Justice (PiS) telah berkuasa sejak 2015.

Meskipun bukan menjadi pemenang dalam pemilihan umum di seluruh negara Eropa, kecuali di Polandia dan Hungaria, popularitas kanan-jauh relatif mempengaruhi dinamika sosial-budaya dan stabilitas ekonomi-politik di sebagian negara-negara Eropa. Pengaruh itu setidaknya dapat ditinjau dari menguatnya sikap anti-Islam (Berntzen, 2018), perilaku diskriminatif terhadap minoritas dan migran hingga pengarusutamaan superioritas kultural dan nasionalisme cauvinistik. Populisme kanan-jauh juga mempengaruhi lahirnya resistensi terhadap status quo model integrasi Uni Eropa dan menjadi kritik atas kegagalan partai politik yang selama ini berkuasa di Eropa (Albertazzi & McDonnell, 2018). Konfigurasi sosial umum Eropa yang selama ini dinilai multikultural bergeser membentuk pola relasi antagonistik antara “kita” (*us/insider/the self*), yakni populisme kanan-jauh dengan coraknya yang radikal (Greven, 2016) berlawanan dengan “yang lain” (*other/the outsider*), yang umumnya merepresentasikan golongan minoritas dan migran. Atas dasar ini, tulisan ini mengajukan pertanyaan,

yakni apa yang menyebabkan kebangkitan kembali populisme kanan-jauh di di Hungaria dan Polandia?

PEMBAHASAN

Konsep Populisme

Populisme seringkali diasosiasikan dengan gerakan politik yang menekankan pada ide dan manifestasi “kepentingan rakyat” (*popular sovereignty*) menentang elit yang korup dan menentang kemapanan (*anti-establishment politics*) (Moffit, 2016). Gerakan populis dalam haluan kanan-jauh (*radical right* dan *extreme right*) dan kiri-radikal (*radical-left*) merupakan konsep yang kompleks untuk didefinisikan dengan jelas (Mudde & Rovira Kaltwasser, 2013). Dalam interaksi politik yang kompleks, populisme dapat digunakan secara dinamis (Bergmann et al., 2021) dan dapat digunakan untuk menggambarkan performa politik presiden, partai dan gerakan sosial sayap kiri di Amerika Latin maupun partai dan gerakan anti-kemapanan sayap kanan di Eropa (Mudde & Kaltwasser, 2017).

Pertanyaannya kemudian bagaimana keterkaitan antara populisme dengan kanan-jauh? Mudde dan Arter menyatakan bahwa populisme kanan-jauh merepresentasikan suatu ideologi yang dibangun atas dasar nativisme, cita-cita kesejahteraan chauvinistik, etno-nasionalisme yang bernuansa otoritarian dan mengedepankan agenda re-aktualisasi identitas nasional dan nilai-nilai tradisional secara eksklusif (Mudde, 2010). Nativisme dalam hal ini dimaknai sebagai basis dari tujuan-tujuan politik dan kebijakan yang berorientasi pada upaya untuk membangun kembali imajinasi kultural sebuah negara-bangsa yang homogen. Kelompok populis kanan-jauh, baik dalam klasifikasi partai politik maupun gerakan sosial adalah kelompok yang cenderung menolak keberagaman dan mengutamakan eksklusivisme bagi penduduk asli dibandingkan orang asing (Akkerman et al., 2016; Rodríguez-Aguilera, 2014).

Selanjutnya, Minkenberg memetakan bahwa kanan-jauh dipahami sebagai ideologi yang dibangun atas dasar mitos bangsa yang homogen sebagai pokok gagasan dan gerakannya. Kanan-jauh merefleksikan

romantisme dan ultranasionalisme yang cenderung menantang demokrasi liberal dan prinsip-prinsip yang mendasari individualisme dan universalisme (Minkenberg, 2017). Sebagai batasan dalam penelitian ini, kiranya penting untuk disajikan klasifikasi yang tergolong ke dalam kelompok populis kanan-jauh di sebagian Eropa pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Klasifikasi Partai Populis Eropa

Populist parties on the right						
Ordinary People and Independent Personalities (OLaNO-NOVA)	Slovakia	Conservative	6.9	7.2	Not populist	Populist
Slovak National Party (SNS)	Slovakia	Radical right	7.6	4.1	Populist	Populist
Sweden Democrats	Sweden	Radical right	8.0	8.0	Populist	Populist
Freedom and Direct Democracy (SPD)	Czech Rep.	Radical right	8.2	9.8	–	Populist
Legia	Italy	Regionalist	8.3	7.8	Populist	Populist
Law and Justice (PiS)	Poland	Radical right	8.3	6.2	Populist	Populist
Kukiz'15	Poland	Radical right	8.3	8.8	–	Populist
Jobbik	Hungary	Radical right	8.5	7.8	Populist	Populist
UK Independence Party (UKIP)	UK	Radical right	8.6	8.2	Populist	Populist
Fidesz	Hungary	Conservative	8.7	5.7	Populist	Populist
Alternative for Germany (AfD)	Germany	Radical right	9.2	8.7	Populist	Populist
Party for Freedom (PVV)	Netherlands	Radical right	9.3	9.5	Populist	Populist
Forum for Democracy (FvD)	Netherlands	Radical right	9.5	9.5	–	–
National Rally	France	Radical right	9.7	8.9	Populist	Populist
Vox	Spain	–	–	–	–	–

Sumber: (Bell et al., 2020)

Tabel diatas menunjukkan bahwa kelompok populis yang berkembang di sebagian negara-negara Eropa secara umum berasosiasi dengan spektrum politik kanan-jauh. Data dalam tabel tersebut juga digunakan oleh peneliti sebagai pijakan menentukan negara-negara yang dinamika politiknya dipengaruhi oleh kekuatan populisme kanan-jauh.

Pada dasarnya, populisme kiri maupun kanan berbagai kesamaan dalam gagasan untuk menyatukan kelompok kita (*us*) dan membentuk sebuah kondisi “kita” melawan “mereka.” Namun keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam menentukan siapa “kita” yang dimaksud. Populisme kiri mendefinisikan “kita” sebagai rakyat yang ditindas oleh struktur dan praktik kapitalisme yang menghalangi kesejahteraan sosial dan berupaya memperjuangkan redistribusi kekuasaan untuk mengurangi ketidaksetaraan, mendukung hak-hak ekonomi dan sosial secara kolektif, dan mengadopsi agenda egaliter (Golder, 2016). Sedangkan, populisme

kanan menyatukan konsep “kita” sebagai rakyat dan negara dan tanah air yang tengah menghadapi ancaman eksternal seperti gelombang pengungsi, komunisme hingga neoliberalisme (Gandesha, 2018).

Titik tolak politik populisme kanan-jauh berangkat dari asumsi dasar bahwa musuh yang menjadi ancaman merupakan kelompok yang diberi label identitas “yang lain” (*the other*). Kelompok kanan-jauh seringkali mendorong perasaan tidak aman dan kecemasan untuk kepentingan justifikasi terhadap xenofobia dan sentimen kebencian terhadap yang lain (Gandesha, 2018). Meskipun berbagi kesamaan dalam keluarga kanan-jauh, beberapa partai kanan di dalam tabel yang disajikan sebelumnya memiliki perbedaan ideologi politik. Dalam spektrum politik kanan-jauh, terdapat dua klasifikasi, yaitu kanan-radikal (*radical right*) dan ekstrim-kanan (*extreme-right*). Radical right dapat digolongkan sebagai oposisi non-liberal terhadap kesetaraan yang masih menerima prinsip dasar demokrasi tetapi mengecualikan budaya, agama dan etnisitas lain yang tidak dikehendaki. Sementara itu, kelompok ekstrim kanan dikarakterisasikan sebagai kekuatan yang mempersoalkan prinsip fundamental demokrasi dan mendukung etnisitas nasional secara eksplisit (Golder, 2016; Shroufi & De Cleen, 2022). Radikal kanan umumnya memanfaatkan saluran politik demokratis dan ekstrim kanan memiliki tendensi terhadap ultranasionalisme dan identik dengan metode kekerasan dalam mewujudkan visi politiknya (Dongen & Leidig, 2021; Gomes, 2019). Keduanya cenderung berbagi posisi politik yang sama dalam menentang isu-isu yang meliputi imigrasi, hak kelompok minoritas, nasionalisme, hak-hak queer dan kesetaraan gender serta agenda neoliberalisme.

Tulisan ini menggunakan terminologi populisme kanan-jauh untuk menyoroti aktor yang mencakup partai politik, komunitas, gerakan sosial hingga pemerintahan di Hungaria dan Polandia. Berkenaan dengan persoalan mengapa populisme kanan-jauh bangkit kembali di dua negara tersebut ditelaah dari teori pertentangan budaya (*cultural backlash*) dan teori ekonomi-politik. Pertama, penganut teori pertentangan budaya, Inglehart dan Norris menyatakan kebangkitan populisme mencerminkan sebuah

reaksi kultural terhadap berbagai perubahan progresif yang dinilai mengikis nilai-nilai dan tradisi masyarakat Barat (Inglehart & Norris, 2016). Kedua, teori ekonomi-politik menjelaskan bahwa kebangkitan populisme sebagai akibat dari kecemasan dan ketidakamanan ekonomi (*economic insecurity*), yang pada gilirannya disebabkan oleh krisis keuangan, hutang, penghematan, dan globalisasi (Rodrik, 2018).

Reaksi Kultural Kanan-Jauh

Tulisan Mudde dan Kaltwasser menyatakan bahwa, populisme kanan-jauh baik yang berbentuk kepartaian atau gerakan sosial umumnya berasosiasi dengan politik identitas dan nativisme (Greven, 2016; Noury & Roland, 2020; Rooduijn, 2018) yang mengagungkan romantisme kejayaan Eropa masa lalu (Chiantera-Stutte & Petö, 2003). Oleh karena itu, penekanan terhadap supremasi kulit putih, homogenitas budaya bangsa asli dan nilai-nilai tradisional Eropa merupakan corak umum gerakan politik kanan-jauh. Pendukung teori pertentangan budaya, Inglehart dan Norris juga menyatakan bahwa arus perubahan budaya yang cepat dianggap sebagai serangan terhadap nilai-nilai tradisional Eropa (Inglehart & Norris, 2016).

Manifestasi politik identitas yang dipraktikkan oleh kelompok kanan-jauh, seperti yang terlihat di sebagian Eropa, cenderung bersifat eksklusif dengan menempatkan janji populer untuk melindungi disorganisasi "mayoritas yang diam" (*the silent majority*) dari bahaya globalisasi, integrasi Eropa, arus migrasi dan dekonstruksi nilai-nilai kultural bangsa Eropa. Dalam konteks ini, gerakan kanan-jauh dapat dikatakan bercorak rasis terhadap keragaman identitas, budaya hingga agama. Permainan politik identitas inilah yang ada di balik fenomena kebangkitan populisme kanan-jauh di Eropa (Fukuyama, 2018; Kaufmann, 2020).

Setidaknya terdapat empat dimensi kultural yang tercermin dari diskursus populisme kanan-jauh di Eropa. Pertama, adanya penekanan terhadap supremasi kulit putih untuk memperoleh dominasi budaya terhadap ras lain. Kedua, domestifikasi peran perempuan sebagaimana yang dilakukan oleh generasi terdahulu bangsa Eropa. Hal ini sejalan dengan apa

yang dinyatakan oleh Tjitske bahwa, ada kecenderungan dimana kekuatan kanan-jauh cenderung menolak kesetaraan gender. Gerakan feminisme dan gender yang didukung oleh kelompok liberal dinilai sebagai bentuk penyimpangan alamiah (Akkerman et al., 2016; Bouron et al., 2021) dan dan lebih jauh disebutkan sebagai akar dari krisis kelahiran bangsa Eropa belakangan ini. Ketiga, kehendak dari kanan-jauh yang mengembalikan ortodoksi dan nilai-nilai fundamental agama sebagai tatanan politik negara. Keempat, melihat bangsa dari segi etnis, serta ciri budaya bersama, seperti bahasa, tradisi, dan agama – kelompok-kelompok tersebut meyakini bahwa percampuran etnis berpeluang melahirkan pertentangan budaya (*cultural backlash*) dan karenanya harus dihentikan (Castelli et al., 2020).

Kekawatiran dalam aspek sosial-budaya menghadirkan sentimen anti-imigran yang dimunculkan oleh kanan-jauh. Hal ini tercermin dari menguatnya politik identitas yang dimanfaatkan untuk re-aktualisasi budaya dan nilai-nilai bangsa asli di kedua negara yang diteliti. Pertama, di Hungaria partai konservatif Jobbik Party menyatakan dengan tegas pada visinya sebagai sebuah gerakan politik radikal yang bercita-cita mempertahankan nilai budaya tradisional keluarga, komunitas lokal, dan gereja. Visi ini didasarkan pada kritik mereka kepada rezim politik yang berkuasa telah menyerah pada kekuatan ultra-liberalis yang berdampak pada lunturnya nilai-nilai tradisional bangsa Hungaria (Jobbik, 2003). Sama halnya dengan pemerintahan Viktor Orban dari kelompok Fidesz (Hungarian Civic Alliance) dalam narasi politiknya menyatakan sebagai berikut:

“Cita-cita kami tidak diragukan lagi adalah Kristen dan didasarkan pada tanggung jawab pribadi; kami menemukan sentimen nasional menjadi hal yang penting dan positif, dan kami percaya bahwa keluarga adalah fondasi masa depan. Mungkin banyak orang percaya sebaliknya, tetapi itu membuat posisi kami tidak kalah dengan posisi Eropa. Boleh jadi dengan ini kita adalah minoritas di Eropa, tetapi posisi ini tidak kurang dari posisi Eropa, dan kita bebas untuk mewakili keyakinan ini.

Untuk membela argumennya, Orbán menyatakan akan ada demokrasi Kristen di Eropa atau tidak akan ada demokrasi sama sekali. Apa yang signifikan tentang tanggapan Orbán terhadap kritik yang ditujukan kepada pemerintahannya adalah penekanan yang dia letakkan pada politik budaya yang dinyatakan sebagai berikut; “Kami orang Hungaria percaya bahwa yang membuat Eropa eksis adalah budayanya” (Furedi, 2018). Implikasi dari pernyataan Orbán adalah bahwa pemerintahannya berdiri untuk sistem norma budaya yang, meskipun bertentangan dengan nilai-nilai lawannya, berakar pada tradisi sejarah Eropa.

Kedua, di Polandia arus populisme kanan-jauh terbilang kuat di tingkat gerakan sipil dan politik elektoral. Partai Law and Justice (PiS) berhasil memenangkan dua kali pemilihan parlemen. Di negara ini, sejumlah gerakan sipil mengajak masyarakat untuk membentuk formasi sosial yang homogen, Pada tanggal hari peringatan kemerdekaan Polandia, 11 November, sekelompok yang mengorganisasikan diri sebagai kelompok pemuda Polandia, kelompok radikal nasional dan kaum ultranasionalis pendukung fundamentalisme Katolik menyuarakan aspirasi tatanan sosial yang berbasis pada nilai-nilai keTuhanan dan kebaktian gereja. Narasi politik yang dibangun antara lain meliputi, "matilah musuh tanah air", "darah Eropa yang bersih", dan "Eropa Kulit Putih". Klaim mereka didasarkan pada tradisi anti-semit, anti-Islam, dan anti-liberalisme (Charnysh, 2017).

Membaca fenomena tersebut membenarkan teori pertentangan budaya yang berarti bahwa sejumlah kelompok populis kanan-jauh di ketiga negara tersebut sedang berusaha untuk mempertahankan homogenitas dan nativisme hingga mengembalikan nilai-nilai tradisi dan agama mayoritas, serta nasionalisme chauvinistik sebagai basis ikatan sosial maupun politik dan imajinasi kultural. Oleh karena itu, baik dalam konteks gerakan sipil maupun politik kepartaian, keberadaan kanan-jauh di Hungaria dan Polandia merefleksikan suatu penolakan terhadap multikulturalisme, kosmopolitanisme dan globalisasi.

Ekonomi-Politik Populisme Kanan-Jauh di Hungaria dan Polandia

Pertanyaan mendasar yang dielaborasi pada bagian ini adalah tentang dimensi ekonomi-politik apa yang mendorong kebangkitan kembali politik kanan-jauh di Hungaria dan Polandia. Cas Mudde (Mudde, 2017), Inglehart dan juga Norris – sebagaimana dikutip Perdana (Perdana, 2019) – menyatakan bahwa ekonomi – meskipun bukan yang utama menjadi prasyarat atas kebangkitan populisme kanan-jauh. Ini mengacu pada ide bahwa kesejahteraan ekonomi “rakyat” diabaikan oleh “elit” dan harus dibangun kembali dengan cara memulihkan kedaulatan ekonomi bangsa. Ide ini menjadi dasar mobilisasi politik yang mengidentifikasi kondisi ekonomi yang dinilai bermasalah – memudarnya kesejahteraan rakyat – dan membuat atribusi tentang siapa yang harus disalahkan (Ivaldi & Mazzoleni, 2019).

Krisis ekonomi tahun 2008 dan solusi tunggal yang ditawarkan oleh Uni Eropa dan otoritas nasional terhadap pengendalian defisit dan langkah penghematan berbasis visi neoliberalisme merupakan salah satu faktor ekonomi-politik yang mendorong kebangkitan populisme kanan-jauh di Hungaria dan Polandia. Kebijakan ekonomi seperti itu dinilai meningkatkan kesenjangan antara segelintir elit istimewa dan beban penduduk yang semakin tinggi. Hal ini dimanfaatkan oleh politisi maupun gerakan kanan-jauh untuk memanfaatkan ketidakpuasan mereka yang tertinggal. Situasi ini diperparah oleh perubahan sosial yang telah menyusutkan bekas kelas pekerja industri, yang secara tradisional mendukung partai-partai sayap kiri klasik. Krisis ideologi dalam spektrum politik kiri dengan cita-cita revolusionernya telah gagal dalam menyuarkan aspirasi kesejahteraan masyarakat.

Kaum populis kanan-jauh mengembangkan sebuah agenda yang dibangun dari kekecewaan masyarakat pekerja yang selama ini mendukung gagasan politik kiri terhadap model ekonomi neoliberalisme. Populisme nasionalis dan otoriter yang dikombinasikan dengan kebijakan kesejahteraan sosial chauvinis, dan janji untuk melindungi orang-orang biasa dari elit neoliberal berupaya untuk menumbuhkan ekonomi berdasarkan pemerintahan mandiri dan model negara pembangunan yang konservatif

(Bluhm & Varga, 2020) merupakan dimensi perjuangan kelompok populis kanan-jauh. Agenda tersebut juga merupakan bentuk upaya meruntuhkan konsensus antara kelompok kanan-tengah dan kiri-tengah sekaligus menentang pengaruh IMF dan kebijakan ekonomi neoliberal terhadap Uni Eropa. Hungaria dan Polandia merupakan dua negara Eropa Timur yang berada digaris terdepan dalam menentang rezim neoliberalisme (Bluhm & Varga, 2020). Para pemimpin populis di kawasan Eropa Timur menempatkan demokratisasi sebagai bentuk penjajahan budaya, dan menyerukan untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi bangsa.

Partai-partai kanan-jauh juga memanfaatkan kondisi ketidakpastian ekonomi melalui retorika pengalihan kesalahan terhadap model ekonomi yang diterapkan di negara-negara Eropa selama ini (Vlandas & Halikiopoulou, 2016). Hal ini diperkuat oleh diskursus “nostalgia” yang menekankan pada periode kesejahteraan ekonomi masa lalu Eropa (Betz & Johnson, 2004). Ekonomi kelompok kelas menengah kulit putih yang selama ini mendapat keistimewaan harus bersaing dengan kelompok imigran dengan ciri identitas yang berbeda (Anditya, 2017). Atas dasar itu, kekuatan populisme kanan-jauh seringkali menempatkan kelompok imigran dan pengungsi sebagai pesaing bagi penduduk asli dalam kompetisi pasar tenaga kerja maupun dalam pelayanan publik (Rodrik, 2017).

Masalah ekonomi yang meliputi kesenjangan sosial, keengganan terhadap hutang riba yang dipraktikkan dalam konteks pinjaman luar negeri yang ditopang oleh rezim neoliberalisme dimanfaatkan oleh kelompok populis kanan-jauh di Hungaria dan Polandia untuk memperoleh simpati publik. Kelompok ini meyakini bahwa pengaruh Konsensus Washington dan reaksi terhadap perbedaan perlakuan dalam kebijakan pekerja migran dan pekerja asli Eropa merupakan salah satu faktor ekonomi yang membangkitkan kembali gerakan populisme kanan-jauh. Selama gelombang migrasi pada periode tahun 2015, sebagian besar kelompok populis kanan-jauh menilai bahwa para imigran mendapat fasilitas ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan penduduk asli.

KESIMPULAN

Kelompok kanan-jauh meraih kepopuleran seiring dengan berbagai krisis yang menimpa Eropa secara umum, antara lain krisis imigran, krisis keamanan, krisis ekonomi, hingga krisis budaya dan identitas. Meningkatnya jumlah imigran yang memasuki Eropa dalam konteks sosiologis menimbulkan kondisi ketakutan masal yang dimanfaatkan oleh kanan-jauh sebagai narasi politik. Kekhawatiran kelompok warga negara asli terhadap kelompok pendatang dianggap menimbulkan persaingan terhadap akses sumber daya yang meliputi sumber daya fisik, seperti perumahan, lapangan pekerjaan, upah dan sumber daya non-fisik seperti agama, budaya dan bahasa tradisi generasi terdahulu. Ditelaah dari sisi ekonomi politik, faktor kebangkitan populisme kanan-jauh di Hungaria dan Polandia dipengaruhi oleh adanya krisis migrasi yang berdampak terhadap beban ekonomi di Polandia dan Hungaria.

Stigmatisasi terhadap kelompok imigran mengenai masalah ekonomi, misalnya imigran dianggap mengancam sistem imigrasi untuk bisa masuk ke negara yang memiliki sistem jaminan sosial terbaik dan pekerja imigran berpotensi merebut lapangan pekerjaan dan upah penduduk kulit putih serta menimbulkan beban kesejahteraan negara. Ketidakamanan ekonomi (*economic insecurity*) turut memengaruhi perubahan perilaku pemilih dari strata sosial terendah dan “mayoritas diam” partai sayap kanan dengan corak budaya yang paternalistik. Perubahan perilaku pemilih dari “mayoritas diam” ini dipengaruhi oleh konstruksi budaya dan ekonomi populis kanan-jauh. Penulis menilai bahwa wacana tentang “*our society first*”, Euroskeptisisme dan kekhawatiran atas masuknya budaya asing dimanfaatkan sebagai instrumen mobilisasi “*the silent majority*” yang dibangun atas dasar motif penguasaan kepemilikan pribadi dan kendali atas alat-alat produksi.

Kondisi Eropa yang tengah dihantam krisis ekonomi dan krisis imigran merupakan sebuah lahan subur bagi partai-partai politik kanan jauh dalam menyebarkan pandangannya, hal ini karena platform dari kelompok tersebut adalah kebencian dan prasangka rasial serta kecurigaan terhadap budaya

yang dibawa masuk oleh kelompok pendatang, kegagalan-kegagalan pemimpin beberapa negara dalam menangani imigran dan kegagalan beberapa kelompok imigran untuk menerima nilai-nilai sekuler Eropa pada gilirannya menciptakan konflik antara penduduk asli versus pendatang.

Pertama, dalam konteks ekonomi, fenomena kebangkitan populisme kanan-jauh di Eropa dapat dilihat dari krisis nasionalisme ekonomi yang disebabkan karena kuatnya globalisasi ekonomi neoliberal, termasuk juga soal kebijakan terbuka pasar tenaga kerja yang menyebabkan persaingan pekerja dari penduduk asli negara-negara Eropa dengan kelas pekerja yang berasal dari pendatang luar Eropa.

Kedua, persaingan antara budaya asli Eropa versus budaya eksternal membenarkan pendapat teori pertentangan budaya. Krisis budaya dan identitas asli Eropa menimbulkan reaksi kultural terhadap budaya pendatang. Ketakutan akan kehilangan identitas budaya karena globalisasi budaya dan multikulturalisme sangat populer di kalangan masyarakat marjinal (*the silent majority*) digunakan sebagai formasi wacana kelompok kanan-jauh. Peningkatan dukungan terhadap narasi itu kekuatan populis kanan-jauh diterima sebagai pelindung sejati budaya dan warisan bangsa asli Eropa.

DAFTAR PUSTAKA

- Akkerman, T., Lange, S. L. de, & Rooduijn, M. (2016). Inclusion and Mainstreaming? Radical Right-Wing Populist Parties in the New Millenium. In T. Akkerman, S. L. de Lange, & M. Rooduijn (Eds.), *Radical Right-Wing Populist Parties in Western Europe*. Routledge.
- Albertazzi, D., & McDonnell, D. (2018). Introduction: The Sceptre and the Spectre. In D. Albertazzi & D. McDonnell (Eds.), *Twenty-First Century Populism*. Palgrave Macmillan.
<https://doi.org/10.3989/ris.2018.76.4.18.089>
- Anditya, N. R. (2017). Right Wing Populism in Democratic Countries: the Return of the Political (No. 6; October).
- Bakry, U.S. (2016). *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bell, J., Poushter, J., Kent, M. F. N., & Moncus, J. J. (2020). *Classifying European Political Parties*. Pew Research Center.

<https://www.pewresearch.org/global/2020/09/21/un-multilateralism-appendix-classifying-european-political-parties/>

- Bergmann, J., Hackenesch, C., & Stockemer, D. (2021). Populist Radical Right Parties in Europe: What Impact Do they Have on Development Policy? *Journal of Common Market Studies*, 59(1), 37–52. <https://doi.org/10.1111/jcms.13143>
- Berntzen, L. E. (2018). *The Anti-Islamic Movement: Far Right and Liberal?* (Issue May). European University Institute.
- Betz, H. G., & Johnson, C. (2004). Against the Current - Stemming the Tide: The Nostalgic Ideology of the Contemporary Radical Populist Right. *Journal of Political Ideologies*, 9(3), 311–327. <https://doi.org/10.1080/1356931042000263546>
- Bluhm, K., & Varga, M. (2020). Conservative Developmental Statism in East Central Europe and Russia. *New Political Economy*, 25(4), 642–659. <https://doi.org/10.1080/13563467.2019.1639146>
- Bouron, S., Bruno, V. A., Charvat, J., Cretan, R., Fernandes, R. C., Dziegielewski, J., Hermansson, P., Khan-Ruf, S., Kuloglija, N., Leman, J., Mcdaid, S., Meret, S., Milo, D., Mulhall, J., Nissen, A., Petsinis, V., Pisani, M., Rafael, S., Rorke, B., ... Walach, V. (2021). *State of Hate, Far-Right Extrimism in Europe* (J. Mulhall & S. Khan-Ruf (eds.)). Hope Note Hate Charitable Trust.
- Castelli, P., Leidig, E., & Aasland, J. (2020). What Characterizes the Far Right Scene in Europe and Beyond? C-REX - Center for Research on Extremism. <https://www.sv.uio.no/c-rex/english/groups/compendium/what-characterizes-the-far-right-scene-in-Europe-and-beyond.html>
- Charnysh, V. (2017). The Rise of Poland's Far Right. *Foreign Affairs*. <https://www.foreignaffairs.com/articles/poland/2017-12-18/rise-polands-far-right>
- Chiantera-Stutte, P., & Petö, A. (2003). Cultures of Populism and the Political Right in Central Europe. *CLCWeb: Comparative Literature and Culture*, 5(4). <https://doi.org/10.7771/1481-4374.1198>
- Dongen, T. van, & Leidig, E. (2021, August 18). Whose Side Are They on? The Diversity of Far-Right Responses to Covid-19. *International Centre for Counter-Terrorism*. <https://icct.nl/publication/whose-side-are-they-on-the-diversity-of-far-right-responses-to-covid-19/>
- Fukuyama, F. (2018). *Identity: the Demand for Dignity and the Politics of Resentment*. Farrar, Straus and Giroux.
- Furedi, F. (2018). *Populism and The European Cultrue Wars, The Conflict of Values between Hungary and the EU* (1st ed.). Routledge.

- Gandesha, S. (2018). Understanding Right and Left Populism. In J. Morelock (Ed.), *Critical Theory and Authoritarian Populism* (pp. 49–70). University of Westminster Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv9hvtcf.7>
- Golder, M. (2016). Far Right Parties in Europe. *Annual Review of Political Science*, 19, 477–497. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-042814-012441>
- Gomes, A. B. P. (2019). Extreme Right Parties in Europe Today: Definition and Electoral Performance. *Revista Estudos Políticos*, 9(17), 124–141. <https://doi.org/10.22409/rep.v9i17.39854>
- Greven, T. (2016). The Rise of Right-wing Populism in Europe and the United States; A Comparative Perspective. In Friedrich Ebert Stiftung (pp. 1–8). Friedrich Ebert Stiftung. <https://doi.org/10.11114/ijsss.v6i10.3650>
- Inglehart, R. F., & Norris, P. (2016). Trump, Brexit, and the Rise of Populism: Economic Have-Nots and Cultural Backlash. In HKS Faculty Research Working Paper Series (No. RWP16-026; Faculty Research Working Paper Series).
- Ivaldi, G., & Mazzoleni, O. (2019). Economic Populism and Producerism: European Right-Wing Populist Parties in a Transatlantic Perspective. *Populism*, 2(1), 1–28. <https://doi.org/10.1163/25888072-02011022>
- Jobbik. (2003). Founding Charter, Manifesto Jobbik. Jobbik Movement for Better Hungary. https://www.jobbik.com/manifesto_0
- Kaufmann, E. (2020). *White Shift: Populism, Immigration and the Future of White Majorities* (Vol. 27, Issue 1). Penguin Books. <https://doi.org/10.5817/pc2020-1-91>
- Minkenberg, M. (2017). The Rise of the Radical Right in Eastern Europe: Between Mainstreaming and Radicalization on JSTOR. *Culture and Society*, 18(1), 27–35. <https://www.jstor.org/stable/26396049>
- Moffit, B. (2016). *The Global Rise of Populism: Performance, Political Style, and Representation*. Stanford University Press. <https://doi.org/10.1177/1354068818768967>
- Mudde, C. (2010). The Populist Radical Right : A Pathological Normalcy. 33(6), 1167–1186.
- Mudde, C. (2016). *On Extremism and Democracy in Europe*. Routledge.
- Mudde, C. (2017). Introduction to the Populist Radical Right. In C. Mudde (Ed.), *The Populist Radical Right: A Reader* (pp. 1–10). Routledge.
- Mudde, C., & Kaltwasser, C. R. (2017). *Populism: A Very Short Introduction*. Oxford University Press.
- Mudde, C., & Rovira Kaltwasser, C. (2013). Exclusionary vs. Inclusionary Populism: Comparing Contemporary Europe and Latin America. *Government and Opposition*, 48(2), 147–174.

- Noury, A., & Roland, G. (2020). Identity Politics and Populism in Europe. *Annual Review of Political Science*, 23, 421–439. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-050718-033542>
- Perdana, A. A. (2019). Populisme Kanan, Islam dan Konteks Indonesia. *Maarif*, 14(1), 29–42.
- Rachmat, A. N. (2020). REALISME DALAM KEBIJAKAN PENOLAKAN PENGUNSI DAN MIGRAN OLEH HUNGARIA TAHUN 2015-2018. *Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 5(01), 47-64. <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jdg.v5i1.192>
- Rodríguez-Aguilera, C. (2014). The Rise of The Far Right in Europe. European Institute of the Mediteranian. <https://www.iemed.org/publication/the-rise-of-the-far-right-in-europe/>
- Rodrik, D. (2017). Populism and the Economics of Globalization (No. 23559; Vol. 11, Issue 23559).
- Rodrik, D. (2018). Populism and the Economics of Globalization. *Journal of International Business Policy*. <https://doi.org/10.1057/s42214-018-0001-4>
- Rooduijn, M. (2018). State of the Field: How to Study Populism and Adjacent Topics? A Plea for Both More and Less Focus. *European Journal of Political Research*, 58(1), 1–11. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12314>
- Sandrin, P. (2021). The Rise of Right-Wing Populism in Europe: A Psychoanalytical Contribution. In *Financial Crisis Management and Democracy*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-54895-7_14
- Shroufi, O., & De Cleen, B. (2022). Far-Right Intellectual Discourse about Populism: the Case of the German Institut für Staatspolitik. *Journal of Political Ideologies*, 00(00), 1–22. <https://doi.org/10.1080/13569317.2022.2066154>
- Vlandas, T., & Halikiopoulou, D. (2016). Why Far Right Parties do Well at Times of Crises: The role of Labour Market Institutions (D/2016/10.574/30; 2016.07).